



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 138 /KEP/DPMPTSP/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA  
SERTA SEKRETARIAT TIM TEKNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan untuk menyelenggarakan perizinan terpadu satu pintu yang terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran kepada masyarakat perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Sekretariat Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Sekretariat Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Sekretariat Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.



## KEDUA

: Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Sekretariat Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyiapkan dan memproses pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. memeriksa dan meneliti kelengkapan/persyaratan setiap permohonan izin yang diajukan;
  - c. melaksanakan pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat analisa/kajian sesuai bidangnya, jika diperlukan;
  - d. memberikan rekomendasi teknis persetujuan atau penolakan permohonan izin sebagai bahan pertimbangan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir untuk memberikan izin;
  - e. menuangkan uraian besaran retribusi ke dalam kajian teknis atau saran/pertimbangan khusus setiap Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
  - f. mengadakan monitoring dan evaluasi perizinan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - g. bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Bupati Ogan Ilir melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
2. Sekretariat Tim Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengakomodir Tim Teknis OPD dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. menetapkan Surat Keputusan Tim Teknis OPD;
  - c. memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Teknis OPD terkait.

## KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha wajib mempedomani Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 235/KEP/DPMPSTP/2020 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Tembusan Yth

1. Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 28 /KEP/DPMPSTP/2022

TANGGAL : 21 Januari 2022

TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR

| No | Jabatan dalam Tim   | Jabatan  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |
|----|---|--|----|---|----|--|----|---|----|--|----|---|
| 1. | Koordinator Tim Teknis  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan</li> </ol>  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |
| 2. | Anggota Tim Teknis  | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">a.</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</li> <li>2. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">b.</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>2. Kabid Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Kabid Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Kabid SDK</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">c.</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3</li> <li>3. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">d.</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>2. Kepala Bidang Peternakan</li> <li>3. Kepala Bidang Perkebunan</li> </ol> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">e.</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan</li> <li>2. Kepala Bidang Perumahan</li> </ol> </td> </tr> </table> | a. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</li> <li>2. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja</li> </ol> | b. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>2. Kabid Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Kabid Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Kabid SDK</li> </ol> | c. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3</li> <li>3. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan</li> </ol> | d. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>2. Kepala Bidang Peternakan</li> <li>3. Kepala Bidang Perkebunan</li> </ol> | e. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan</li> <li>2. Kepala Bidang Perumahan</li> </ol> |
| a. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja</li> <li>2. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja</li> </ol>   |  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |
| b. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>2. Kabid Pelayanan Kesehatan</li> <li>3. Kabid Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Kabid SDK</li> </ol>  |  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |
| c. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3</li> <li>3. Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan</li> </ol> |  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |
| d. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>2. Kepala Bidang Peternakan</li> <li>3. Kepala Bidang Perkebunan</li> </ol>  |  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |
| e. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan</li> <li>2. Kepala Bidang Perumahan</li> </ol>   |  |    |   |    |  |    |   |    |  |    |   |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>f. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br/>2. Kepala Bidang Pembinaan SD<br/>3. Kepala Bidang Pembinaan SMP<br/>4. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.</p>   |
|  | <p>g. 1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br/>2. Kepala Bidang Perdagangan<br/>3. Kepala Bidang Perindustrian<br/>4. Kepala Bidang Koperasi<br/>5. Kepala Bidang UMKM</p> |
|  | <p>h. 1. Kepala Dinas Perhubungan<br/>2. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Perkeretaapian</p>  |
|  | <p>i. 1. Kepala Dinas Perikanan<br/>2. Kepala Bidang Perikanan</p>  |
|  | <p>j. 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian<br/>2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika</p>   |
|  | <p>k. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br/>2. Kepala Bidang Tata Ruang<br/>3. Kepala Bidang Tata Bangunan</p>  |
|  | <p>l. 1. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata<br/>2. Kepala Bidang Pariwisata</p>   |
|  | <p>m. 1. Kepala Kantor Pertanahan<br/>2. Kasi Penataan dan Pemberdayaan BPN</p>   |

BUPATI OGAN ILIR,



PANCA WIJAYA AKBAR

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 138 /KEP/DPMPSTP/2022  
TANGGAL : 21 Januari 2022

SEKRETARIAT TIM TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN ILIR

| No | Jabatan dalam Tim | Nama/Jabatan   |
|----|-------------------|--|
| 1. | Pengarah          | Assisten I Bidang Pemerintahan<br>Setda Kabupaten Ogan Ilir  |
| 2. | Penanggung Jawab  | Kepala Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Kabupaten Ogan Ilir  |
| 3. | Ketua             | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan<br>dan Non Perizinan Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Kabupaten<br>Ogan Ilir                       |
| 4. | Sekretaris        | Kepala Seksi Pelayanan Perizinan<br>dan Non Perizinan serta Penata<br>Perizinan Dinas Penanaman Modal<br>dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>Kabupaten Ogan Ilir |
| 5. | Anggota PNS       | 14 Orang PNS Dinas Penanaman<br>Modal dan Pelayanan Terpadu Satu<br>Pintu Kabupaten Ogan Ilir  |
| 6. | Anggota Non PNS   | 20 Orang Non PNS Dinas<br>Penanaman Modal dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu Kabupaten<br>Ogan Ilir   |

BUPATI OGAN ILIR,



PANCA WIJAYA AKBAR

1E

1N

14P